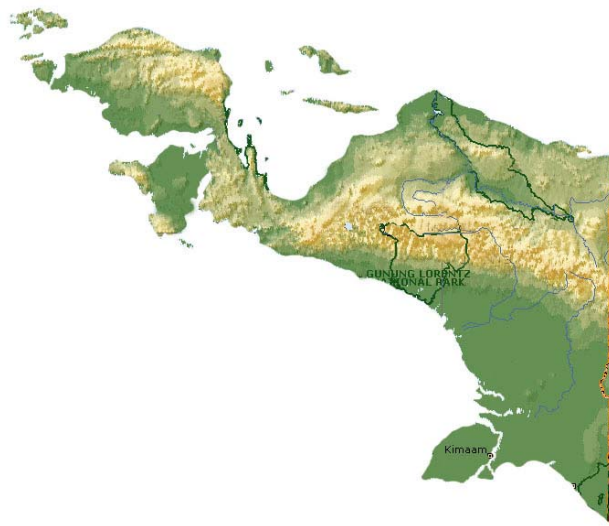


PAPUA AKTUAL 2004

(Oktober – Desember)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian
KEUSKUPAN JAYAPURA**

Februari 2005

Kata pengantar

7 elah menjadi bagian program SKP Keuskupan Jayapura untuk menyajikan analisis triwulan mengenai perkembangan sosial-politik di Papua kepada khalayak ramai melalui Seri Sosio-Political Notes. Tulisan ini merupakan edisi kesepuluh dan secara khusus memberi perhatian pada dinamika tersebut dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2004.

Sajian edisi ini mengikuti pola baru yang telah dikembangkan pada edisi kesembilan dengan menggali masalah sipil-politik sekaligus ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, diskusi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap mendapatkan tempat yang wajar dan justru sedikit meningkat karena perhatian terhadap hal ini juga meningkat.

Dengan paparan yang bersifat pandangan menyeluruh, pembaca diharapkan dapat diantar ke dalam kenyataan yang lebih luas yang mempengaruhi dinamika sosial-politik masyarakat di Papua ini.

Selamat membaca!
28 Februari 2005

Rudolf Kambayong ofm
Penulis

Bagian I
Peta Hak-hak Asasi Manusia di Papua

A. Hak-hak sipil dan politik

1 Oktober

Tom Beanal menyampaikan kekesalannya atas kinerja KPUD Mimika, khususnya rencana pelantikan DPRD Mimika yang beberapa kali mengalami penundaan. KPU diminta untuk lebih tegas menentukan jadwal pelantikan agar masyarakat tidak bingung. Dan kepada para DPRD baru yang akan dilantik Tom Beanal mengingatkan bahwa mereka harus berperan sebagai wakil rakyat yang benar-benar memikirkan daerah Mimika. Maka baiklah jika para Dewan membuat kontrak sosial dengan masyarakat.

3 Oktober

Melalui fax Mahkamah Konstitusi tertanggal 30 September 2004 menyampaikan kepada Gubernur Papua dan Ketua DPRD Papua, bahwa sidang Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No. 45 tahun 1999, yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2004, ditunda sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Alasan penundaan sidang adalah soal pergantian pimpinan pemerintahan, anggota DPR RI dan DPRD yang baru.

Mahasiswa dan pemuda yang menamakan dirinya Arfak-Doreri dan Wamesa (Ardomesa) berdemonstrasi di luar halaman DPRD Manokwari ketika sedang berlangsung pelantikan anggota DPRD Irian Jaya Barat. Kepada Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat Abraham Atururi, Ardomesa mendesak (1) Gubernur harus berusaha menyiapkan satu kursi di DPR RI agar mendudukan Obed Rumburen sebagai perwakilan Irian Jaya Barat. (2) agar Ibu Kota Irian Jaya Barat tetap berada di Manokwari dan (3) Gubernur dan DPRD Irian Jaya Barat harus menyiapkan 4 kursi bagi tokoh Ardomesa.

Dalam acara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Boven Digul, Gubernur Drs. JP Solossa minta kepada Dewan untuk tetap berada di tempat tugas agar bisa membantu masyarakat.

4 Oktober

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan vonis atas perkara makar di Distrik Bolakme-Wamena. Kedua tersangka; Yenggerly Murib divonis hukuman penjara 20 tahun dan Jigi Jigibalon divonis hukuman penjara 15 tahun.

Setelah menandatangani kontrak politik di hadapan masyarakat 25 anggota DPRD Irian Jaya Barat mulai bekerja. Tanggal 4 Oktober 2004 merupakan hari pertama Dewan Irja Barat bekerja.

Puluhan massa dari Partai Penegak Demokrasi Kebangsaan berdemonstrasi di kantor Pengadilan Negeri Manokwari. Demonstrasi terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perkara Caleg DPR RI Obed Rumburen yang diganti dengan Caleg PDS Pastor Saut Hasibuan. Para demonstran kemudian memalang jalan masuk Kantor Pengadilan Manokwari.

5 Oktober

Dalam rangka HUT TNI, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI, Nurdin Zainal berkomentar tentang UU TNI yang baru disahkan oleh DPR RI. Bahwa walaupun dalam UU memuat pasal-pasal pembubaran Komando kewilayahan mulai dari

Kodim sampai Koramil namun tidak ada pengaruhnya terhadap kodam di Papua. Komando kewilayahan di Papua tidak dibubarkan, malahan akan ditambah 3 batalyon lagi di Papua karena Papua jelas – jelas masuk dalam daerah rawan.

Penasihat hukum kasus makar Bolakme, Iwan. K . Niode menyatakan tidak puas atas putusan PN Wamena atas kliennya; Yenggeri Murib yang divonis 20 tahun penjara dan Jigi Jigibalon yang divonis 15 tahun penjara. Atas putusan PN Wamena pihak penasihat hukum menyatakan naik banding.

06 Oktober

Hidayat Nurwahid terpilih sebagai Ketua MPR RI, setelah paket calon pimpinan yang diajukan oleh Koalisi Kebangsaan hanya memperoleh 324 suara, sementara Koalisi Gabungan memperoleh 326 suara dari jumlah total 673 anggota yang ikut memilih.

Kasus Mariedi berdarah Distrik Fafuruar Kabupaten Teluk Bintuni, yangmana Manase Furima dan Mathius Furima didakwa pasal tindakan makar dan kepemilikan senjata disidangkan di PN Manokwari. Persidangan itu berlangsung dengan agenda pembacaan eksepsi. Penasihat hukum terdakwa meminta agar Majelis hakim menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena terkesan memberatkan.

Akibat tidak dilibatkan dalam pleno penetapan hasil pemilu legislatif di Kabupaten Mimika, empat orang KPUD Mimika mengadu kepada KPU Provinsi. Empat anggota KPUD meminta kepada KPU Provinsi untuk mengambil sikap tegas terhadap Ketua KPU Mimika Vience Tebay, S.Sos, karena bertindak sendiri dan mengatasnamakan KPUD Mimika.

Kelompok Intelektual Sarmi minta kepada pihak KPUD Sarmi dan Gubernur Papua untuk mengklarifikasi perbedaan daftar nama calon yang dikeluarkan oleh Gubernur dan KPU Kabupaten Sarmi. Dalam daftar yang dikeluarkan oleh KPU Sarmi tiga calon dari partai PDI-P, PSI dan PPP tidak ada, sementara daftar yang dikeluarkan oleh Gubernur tiga Partai PDI-P, PSI dan PPP dimasukkan.

Aksi pemalangan Kantor Pengadilan Negeri Manokwari yang dilakukan oleh kelompok pendukung Obet Rumburen sejak tanggal 2 Oktober 2004 akhirnya dibuka setelah ada kesepakatan dengan Muspida Kabupaten, bahwa Muspida Kabupaten akan memperjuangkan Obed Rumburen menjadi anggota DPR RI menggantikan Pastor Saut Hasibuan.

Seusai Rapat Koordinasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Gubernur Papua JP. Solossa menyampaikan bahwa salah satu persoalan dalam pendidikan selama ini adalah kesejahteraan guru, khusus perumahan guru. Untuk itu DPU diminta untuk dalam pembangunan rumah pemerintah provinsi, dari total yang harus dibangun 20 %-nya untuk perumahan guru dan medis.

8 Oktober

49 anggota DPRD Provinsi Papua periode 2004–2009 resmi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua, Efraim Mayor, SH di Ruang Sidang Kantor DPRD Papua. Pada saat yang bersamaan kelompok mahasiswa yang menamakan diri Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMI) beraksi di luar gedung DPRD Provinsi. KAMI meminta agar para Dewan utamakan kepentingan rakyat, dan mendesak agar Dewan tanda tangan kontrak politik.

Pelantikan Caleg Mimika masih terus tertunda karena bermasalah bermasalah, antara lain menyangkut SK Gubernur Papua. Dalam kaitannya dengan itu Gubernur

minta kepada pihak terkait bahwa apabila ada hal mendasar yang menuntut perubahan supaya disampaikan.

Menurut Sekda Provinsi Papua, Andi Baso Bassaleng, formasi PNS tahun 2004 – 2005 Provinsi Papua akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Orientasi pada tahun ini lebih banyak diarahkan kepada tenaga medis dan guru dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.

Merasa tidak puas dengan SK Gubernur No. 211 tahun 2004 tentang penempatan dan pelantikan anggota DPRD Sarmi periode 2004 – 2009, tujuh orang Caleg menggugat Gubernur Papua, KPU Provinsi Papua, Bupati Sarmi dan KPU Kabupaten Sarmi. Gugatan ketujuh caleg dialamatkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 8 Oktober dengan No. 04/U/Tun/2004/PTUN.JPR.

13 Oktober

6 warga sipil ditemukan tewas di Kabupaten Puncak Jaya. Menurut AsIntel Kodam XVII/Trikora Kolonel (Inf) W.P. Sinmanjuntak, korban adalah karyawan PT Modern yang bekerja sebagai pengaspal jalan. AsIntel Kodam XVII/Trikora menyampaikan bahwa pelaku pembunuhan adalah TPN/OPM.

Gubernur Papua JP.Solossa membuka Lokakarya Evaluasi Otonomi Khusus Papua kedua tahun 2004. Acara evaluasi berlangsung di Gedung Sasana Krida Dok II Jayapura selama tiga hari; tanggal 13 – 15 Oktober 2004. Hadir pada Lokakarya Deputy Menteri Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Michael Manufandu MBA. Sedangkan undangan lain dari Jakarta; Dirjen Otda dan Pembangunan Daerah, Bapenas dan Kementerian Keuangan tidak hadir. Maksud dari kegiatan evaluasi ini adalah melihat sejauhmana Provinsi Papua bergerak maju dan sekaligus menjadi media bagi pemerintah untuk menyampaikan apa yang dikerjakan selama tahun 2003.

Pihak PT Modern meluruskan keterangan AsIntel Kodam dan Kapolda Papua Timbul Silaen bahwa 6 korban pembunuhan di Mulia bukan karyawan PT Modern.

15 Oktober

Aksi teroris yang kian merajalela di Indonesia membuat jajaran Kepolisian Papua turut waspada. Dalam rangkaantisipasi Polda Papua sedang membahas pembentukan Detasemen Khusus yaitu Detasemen 88 Anti teroris di Papua.

Terjadi kontak senjata antara TNI Linud 432/Kostrad Karianggu Makassar dengan TPN/OPM yang diduga pimpinan Matias Mikawa di Arso Kabupaten Kerom. Tidak ada korban dalam insiden itu.

16 Oktober

19 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang dilantik, sementara satu anggota lainnya tidak dilantik karena persoalan partai.

Salah satu anggota DPRD Manokwari dari fraksi Golkar, Ance Wabdaron, menyampaikan permohonan pengunduran diri sebelum pelantikan karena menerima teror dan ancaman.

17 Oktober

Kabupaten Teluk Wondama akan menambah formasi PNS tahun 2004 sebanyak 175 sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut Bupati Teluk Wondama, Albert. H. Torey, SH tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh Kabupaten Teluk Wondama adalah dibidang kesehatan, pendidikan dan tenaga-tenaga profesional.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya dihadang sekelompok masyarakat bersenjata di depan kantor Distrik Tinggi Nambut. Penyerangan itu mengakibatkan 9 orang luka-luka. Tiga orang mengalami luka serius di antaranya adalah Kepala Distrik Mulia.

Tim Keamanan Gabungan untuk Mulia menangkap dua pemuda Nendilus Telenggen dan Kisma Telenggen yang diduga terlibat dalam aksi kelompok bersenjata yang menelan enam korban jiwa. Kedua tersangka telah diamankan oleh Polsek Mulia untuk dimintai keterangan.

18 Oktober

Dari perseteruan antara TNI/Polri dengan TPN/OPM di Puncak Jaya mengakibatkan 2 bangunan sekolah dan satu kantor di Distrik Nambut dan Ilu dibakar. Pihak aparat keamanan menduga pelaku pembakaran adalah kelompok Goliat Tabuni.

Kelompok Mahasiswa yang menamakan diri Komite Solidaritas Mahasiswa Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua, mengadakan demonstrasi di Kantor DPRD Papua. Kepada pemerintah diminta untuk mengakui keberadaan Bangsa Papua Barat sebagai bangsa yang berdaulat dan telah merdeka.

Seminar sehari tentang Pengolahan Hutan di Papua, mensosialisasikan Konsep Pengolahan Hutan Alternatif Kawasan Konservasi dan *illegal logging*. Seminar berlangsung di Gedung Kartini Manokwari yang dihadiri instansi pemerintah terkait, Unipa dan LSM. Dalam kaitannya dengan pembangunan disampaikan bahwa aspek penting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan SDA mesti didukung dengan perencanaan yang matang, tentunya membutuhkan sumber daya manusia dan profesionalitas yang memadai.

Paulus Wangginop dari Fraksi Golkar terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boven Digul periode 2004–2009. Sementara wakil ketua masing–masing; Wakil Ketua I Yusak Yaluwo dan Wakil Ketua II Lukas Ikwaron.

19 Oktober

Capres Susilo Bambang Yudhoyono dan Cawapres Yusuf Kalla berdialog jarak jauh via Vido Teleconference dengan perwakilan 16 daerah di Indonesia termasuk Papua. Dari Papua Capres dan Wacepres diminta untuk menyelesaikan masalah–masalah di Papua dengan mengevaluasi kebijakan–kebijakan yang diambil terhadap Otsus Papua, terhadap MRP yang belum disahkan, dan terhadap pemekaran Papua. Sebagai jawaban Capres dan Cawapres menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah, misalnya dengan mengevaluasi pekerjaan para menteri setiap tahun.

Menko Polkam ad interim Hari Sabarno yang hampir berakhir masa jabatannya, merekomendasikan masalah Papua dan Aceh kepada pengantinya nanti agar diperhatikan sebagai prioritas utama dalam menjalankan tugas ke depan.

Daniel Walinulik dari Fraksi Gabungan asal Partai Persatuan Daerah terpilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke periode 2004 – 2009.

22 Oktober

Drs. John Ibo, MM kembali terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua; sementara wakil – wakilnya adalah Wakil Ketua I, Komarudin Watubun,SH, Wakil Ketua II, Ev. Yop Kogoya. DIP, Th dan Wakil Ketua III, Paskalis Kosay, S.Pd, MM.

Terjadi kontak senjata antara TNI gabungan dengan TPN/OPM di Tinggi Nambut. Menurut laporan pihak TNI, satu orang pihak TPN/OPM mengalami luka tembak. TNI juga berhasil merebut 1 pucuk senjata M –16 yang diduga kuat berasal dari gudang Kodim 1702 Wamena yang dibobol 4 April 2003.

Puluhan elemen masyarakat Port Numbay dan Forum Komunikasi Mahasiswa Port Numbay mendatangi kantor DPRD Kota dan minta untuk berdialog dengan Dewan sebelum pemilihan pimpinan Dewan. Pihak massa meminta agar pimpinan nanti harus orang asli Port Numbay.

22 Oktober

23 anggota Dewan Kabupaten Nabire dilantik di ruang sidang paripurna DPRD Nabire. Acara pelantikan diwarnai dengan sedikit keributan salah satu calon terpilih Partai PKPI yang dicoret dan diganti dengan nama lain diajukan oleh Partai PKPI sendiri.

26 Oktober

Mahasiswa dan masyarakat Koteka melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Papua. Kepada pihak DPRD Papua pembedemo minta untuk memfasilitasi dialog dengan Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Trikora. Pihak DPRD Papua berjanji akan mempertemukan Mahasiswa dan Masyarakat Koteka dengan Kapolda Papua dan XVII/Trikora. Pembedemo juga menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi korban penembakan militer adalah seorang pendeta bukan anggota TPN/OPM. Mereka juga menyampaikan turut berdukacita atas pembunuhan terhadap 6 warga sipil lainnya.

27 Oktober

Mahasiswa dan Masyarakat Koteka kembali ke Kantor DPRD Papua untuk berdialog dengan Kapolda Papua dan XVII/Trikora. Dalam dialog Kopassus ditunding sebagai pelaku penembakan atas warga sipil di Mulia. Pembedemo juga minta agar aparat militer non organik ditarik dari Mulia.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. G.M. Timbul Silaen menanggapi tuntutan massa menyatakan bahwa Polda Papua siap untuk menuntaskan kasus Mulia dan menyeret para pelakunya untuk diproses secara hukum.

29 Oktober

Pangdam XVII/Trikora, Mayjen TNI, Nurdin Zainal menanggapi tudingan bahwa bukan TNI - Kopassus pelaku penembakan 6 warga sipil tetapi TPN/OPM. Juga ditambahkan bahwa seorang sipil yang tertembak oleh TNI adalah gembala ternak.

Mahasiswa dan Masyarakat Koteka mendatangi Kantor Gubernur Papua dan menuntut agar Bupati Puncak Jaya Drs. Elieser Renmaur segera turun dari jabatannya karena dialah yang meminta militer datang ke Mulia.

Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. G.M. Timbul Silaen diganti oleh Brigjen Pol Drs. D. Sumantyan, HS, SH. Upacara serah terima jabatan berlangsung di Mabes Polri Jakarta.

1 November

Pengadilan Negeri Manokwari telah melakukan pemeriksaan tersangka maka Manase Furima. Hari ini sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang dihadirkan untuk diperiksa sebanyak 26 orang.

Setelah menunda pelantikan beberapa kali akhirnya DPRD Biak–Numfor dapat menyelenggarakan pemilihan Ketua DPRD. Sebagai Ketua terpilih dalam periode 2004–2009, Nehemia Wospakrik.

2 November

Tim tragedi kasus Mulia terbentuk. Tim terdiri dari 16 komponen dan terbagi dalam dua sub kelompok, kelompok kemanusiaan dan kelompok investigasi. Kelompok kemanusiaan dikoordinir oleh dr. Manangsang dari pihak DPRD Provinsi dan kelompok investigasi dikoordinir oleh Dorus Wakum dari Kontras Papua. Jumlah seluruh anggota tim berjumlah 33 orang. Penanggungjawab umum Tim tragedi Mulia Wakil Ketua DPRD Provinsi Paskalis Kossay.

BAP dari kasus *illegal logging* mantan Kapolres Sorong, Faizal Abdul Nazir telah selesai dan telah diserahkan kepada Kejaksaan Negari Sorong.

Sebagai tanggapan atas aksi demo para pengusaha di Wamena, Kajari Wamena mengirim surat kepada Kajari Papua dengan tembusan kepada Kajagung, agar segera memperhatikan pengaduan pengusaha karena ada indikasi korupsi.

Penerbitan SK Gubernur No. 218/2004 tentang penambahan 2 anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya membuat Caleg PDS Ny. Izebereth Kogoya menggugat Gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui kuasa hukumnya Adolf Waramori, SH.

3 November

Peristiwa penembakan 6 warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya masih simpang siur. Informasi yang beredar dalam masyarakat sangat terbatas karena sumbernya pun terbatas. Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat Gereja – Gereja di Papua meminta Komnas HAM membentuk KPP-HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus Mulia berdasarkan kewenangan hukum yang dimiliki.

4 November

Dalam acara pelantikan Kajari Manokwari, Kajari Papua, Suhartoyo, SH mengakui bahwa kinerja penegak hukum telah mencapai titik terendah. Masyarakat tidak puas dengan kerja penegak hukum sebagai akibat menjadi sorotan dimana – mana.

Polres Merauke menggelar Operasi Ketupat. Dalam operasi petugas menyita ratusan minuman keras; 249 botol bermerek Robinson, 28 bermerek bir putih dan 4 botol bir hitam dan minuman lokal.

5 November

Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengizinkan 6 bupati untuk diperiksa terkait dugaan korupsi. Salah satu dari 6 Bupati yang mendapat rekomendasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat adalah Bupati Nabire AP. Youw.

6 November

Reskrim Polda Papua Kombes Pol. Drs. M. Situmorang mengatakan bahwa berkas perkara Bupati Nabire, AP Youw telah sampai di Polda Papua. Berkaitan dengan itu pihak Polda sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

8 November

Terkait dengan dugaan korupsi, Bupati Nabire AP Youw menghadap Gubernur Papua di Kantor Gubernur Papua, Dok II. AP Youw menyatakan diri siap untuk diperiksa pihak berwajib dan apabila bersalah juga siap menerima hukuman.

Menjelang tanggal 1 Desember Korem 172/PWJ mengantisipasi kegiatan – kegiatan TPN/OPM, terutama di daerah perbatasan PNG–RI. Korem 172 akan meningkatkan patroli dan meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian. Hal ini disampaikan Danrem 172/PWJ Kolonel Inf. Agus Mulyadi se usai upacara HUT Korem ke – 41 di Lapangan Apel Kodim Jayapura.

Sidang lanjutan kasus makar Bolakme kembali digelar di PN Wamena. Agenda sidang masih mendengar keterangan 3 saksi. Dari tiga saksi, Kapolsek Bokondini, Aiptu Agus Ayadi juga dipanggil sebagai saksi tambahan. Dalam keterangan Kapolres menyampaikan keterlibatan para terdakwa sebagai TPN/OPM dari wilayah Bolakme dan Piramid.

9 November

Polda Papua mengirim surat panggilan kepada Bupati Nabire AP Youw agar AP. Youw datang ke Reskrim Polda Papua pada tanggal 17 November 2004, untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas dugaan korupsi.

Menurut Gubernur Papua, pemeriksaan terhadap Bupati AP Youw adalah hal yang wajar dan sesuai dengan komitmen pemerintah sekarang memberantas korupsi dari pejabat publik.

Rapat Koordinasi Teknis KPU Papua bersama seluruh KPU Daerah Se-Papua di Jayapura. Dalam rapat dibahas *draft* pembuatan laporan pertanggungjawaban hasil Pemilu legislatif dan Pilres yang berlangsung di Papua. Laporan diharapkan sudah selesai tanggal 20 Desember atau sebelum hari Raya Natal.

Menurut Direktur Elsham Papua dan LP3BH Manokwari, Pemerintah RI tidak serius menyelesaikan pelanggaran–pelanggaran HAM di Papua, seperti kasus Abepura, Wasior dan Mariedi di Bintuni. Kepada Kejaksaan Agung RI diminta untuk menyelesaikan tugas penyidik kasus Wasior dan melimpahkan ke Pengadilan HAM.

10 November

Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara uji materi UU No.45/1999 tentang Pemekaran Provinsi Papua dan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua. Bahwa UU 45 tahun 1999 bertentangan dengan UUD Negera Republik Indonesia. Karenanya UU 45 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum.

Kematian Theys Hiyo Eluay diperingat dengan berdoa bersama dan tabur bunga di pusara dengan melakukan *long mach* dari kediaman almarhum ke pemakaman dan membacakan seruan – seruan.

18 November

Tim 7 DPRD Papua untuk tragedi Mulia memplenokan hasil kunjungannya ke Mulia untuk melihat secara langsung keadaan Mulia pasca pembantaian 6 warga sipil dan mencek kebenaran laporan laporan selama aksi demo masyarakat di kantor DPRD Papua.

22 November

Menjaga kerukunan dan perdamaian di Papua bukanlah menjadi tugas pihak tertentu saja tetapi menjadi tugas semua komponen di Papua. Hal ini terungkap dalam acara Sosialisasi Kampanye Hidup Rukun Dalam Kemajemukan (Kampanye Hidup Rukun) yang diselenggarakan oleh Deputy Bidang Kelestarian dan Pariwisata, di Auditorium Museum Negeri Waena Jayapura, selama sehari. Sebagai peserta dalam acara adalah pemerintah tokoh masyarakat, agama, LSM, Perempuan dan komponen

masyarakat lain. Wilayah Papua termasuk salah satu dari 11 wilayah penyelenggara Kampanye Hidup Rukun.

Kapolda Papua Brigjen Polisi D. Sumantyan.H.S,SH mengatakan pelaku pembunuhan Briptu Yance Kiryoma dalam peristiwa penyerangan tanggal 12 November 2004 yang dilakukan oleh sekelompok warga sipil di Mulia diduga sebanyak 4 orang. Lebih lanjut diterangkan bahwa sebanyak 4 orang warga telah teridentifikasi.

Sekitar 20 orang yang berasal dari komponen masyarakat Port Numbay dibawah pimpinan Ekson Fingkereuw mendatangi Kantor DPRD Kota Jayapura tepat pada saat rapat pemilihan ketua komisi. Mereka meminta agar jabatan Ketua Komisi A diberikan kepada anggota Dewan asli Port Numbay. Pendemo diterima oleh Soni Awie beserta sejumlah anggota Dewan lainnya.

Sidang kasus dugaan makar yang terjadi di Distrik Bokondini, Kabupaten Jayawijaya digelar di Pengadilan Negeri Wamena. Sidang ini merupakan sidang ke 6 dan menghadirkan saksi Danramil Bokondini. Ketiga terdakwa; Detinus Wenda, Wetinus Wenda dan Tepenar alias Step Wenda didampingi Penasihat Hukumnya Pantrisno R. Tagihuma, SH.

Dalam kesaksiannya sehubungan dengan sidang kasus makar tersebut, Danramil Bokondini mengatakan bahwa ketiga terdakwa termasuk Marius Kogoya yang tewas terkena peluru aparat, sebelumnya saat dimintai keterangan di Pos Polsek Bokondini mengaku sebagai anggota TPN/OPM dan pernah terlibat pengibaran bendera Bintang Kejora di lapangan Wamena, Bolakme dan daerah lainnya.

23 November

Muspida Provinsi Papua mengeluarkan seruan bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Papua untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sebagai bentuk perayaan hari kemerdekaan Papua 1 Desember 2004. Seruan ini dikeluarkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai seterusnya di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Kapolda Papua Brigjen Polisi D. Sumantyan.H.S,SH melakukan kunjungan ke Keuskupan Jayapura dan diterima langsung oleh Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladar, ofm. Dalam pertemuan tersebut Kapolda menyampaikan visi dan misi Polri terkait berbagai perubahan dan reformasi di tubuh Polri. Kapolda juga mengucapkan terimakasih atas berbagai masukan yang disampaikan Keuskupan kepada Polda Papua terkait apa yang terjadi di Distrik Assue kabupaten Mappi beberapa waktu yang lalu. Uskup Jayapura pada kesempatan itu menjelaskan mengenai wilayah pelayanan Keuskupan Jayapura sekaligus menyampaikan visi dan misi pelayanan yang diusung Keuskupan tidak lain adalah dalam rangka membangun damai, supaya Papua menjadi Tanah Damai.

Dewan Adat Papua (DAP) mengeluarkan 11 seruan menyikapi kondisi sosial politik di Papua akhir-akhir ini diantaranya kontak senjata di Mulia, Puncak Jaya, juga maraknya bisnis gaharu di Kabupaten Mappi dan meningkatnya HIV/AIDS di Papua. Pada kesempatan itu juga dinyatakan keprihatinan DAP mengenai kebijakan Otsus dengan MRP yang tidak konsisten dan terabaikan. *(isi seruan dapat dilihat pada lampiran).*

Gubernur Drs. JP Solossa, membuka pameran pembangunan Otsus di GOR Cenderawasih Jayapura. Dalam sambutannya dikatakan, "Proses lahirnya Otsus penuh dengan perjuangan dan keprihatinan akan kondisi riil di daerah ini apalagi

ketika itu Otsus sulit untuk diterima oleh pemerintah pusat tetapi akhirnya pada tanggal 21 November 2001 ditetapkan UU No.21 2001 tentang Otsus Papua". Lebih lanjut dikatakan," Otsus lahir karena perjuangan seluruh rakyat Papua yang peduli dan sadar bahwa kita adalah bagian dari NKRI yang tertinggal dan kurang perhatian".

Kepala Direktorat Reskrim Polda Papua Kombes Pol. Drs. M. Situmorang mengatakan hasil pemeriksaan tersangka dugaan korupsi pembangunan Ruko Nabire, Bupati Nabire A.P.Youw belum selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 29 November 2004.

24 November

Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Kristian Warinusi, Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap status hukum Irian Jaya Barat masih membingungkan. Karena walaupun dinyatakan tidak memiliki hukum mengikat atau batal demi hukum dan namun praktek sebagai Provinsi Irian Jaya Barat tetap berjalan seperti biasa. Kristian juga mempertanyakan sejauhmana masa jabatan Pjs Gubernur Irian Jaya Barat berlaku.

25 November

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir pelantikan 23 anggota DPRD Mimika, Papua yang dilantik berdasarkan SK KPU nomor 89/2004, karena tidak disertai SK Gubernur Papua, dan juga karena Ketua KPUD Mimika melakukan revisi terhadap SK KPU nomor 44/2004 yang telah dikeluarkan sebelumnya. Wakil Ketua KPU Ramlam Surbakti mengatakan pihaknya menganulir pelantikan tersebut melalui rapat pleno sekaligus menetapkan penghentian ketua KPUD Mimika, Vince Tebay.

Kapolda Papua Brigjen Polisi D. Sumantyan. HS, SH mengeluarkan maklumat dengan Nipol MAK/1777793/XI/2004 yang melarang perayaan 1 Desember sebagai Hari Kemerdekaan Papua. Dalam maklumat tersebut dikatakan pelanggaran terhadap perayaan tersebut juga merupakan tidak pidana, dan bagi pelanggarnya akan ditindak sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

26 November

Habel Melkias Suwae,S.Sos,MM yang nota bene adalah Bupati Kabupaten Jayapura terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jayapura dalam Musyawarah Daerah (Musda) dengan menyisihkan 4 calon lainnya.

27 November

Kapolda Papua, Brigjen Polisi D. Sumantyan.H.S,SH melantik Kapolres Persiapan Puncak Jaya Kopol Hans Somnaikubun. Pelantikan tersebut bersamaan dengan peresmian operasional Gedung Polres Persiapan Puncak Jaya di Mulia.

29 November

Permohonan izin Filep Karma untuk memperingati hari Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Desember ditolak pihak Polda Papua.

30 November

Komnas HAM mengajukan Budget operasional tahun 2005 kepada Komisi III DPR RI untuk dibahas. Budget yang diminta oleh Komnas HAM sebesar Rp, 29,6 Miliar. Komisi III DPR RI menilai budget operasional Komnas HAM masih belum cukup bila melihat pekerjaan Komnas HAM. Komisi III DPR RI bersedia untuk memperjuangkan tambahan dana jika Komnas mau menaikkan Budget operasional untuk tahun 2005.

Bupati Biak, Melianus Maryen, minta kepada warga Biak-Numfor untuk mentaati seruan Gubernur Papua menjelang 1 Desember 2004. Kepada masyarakat diminta

untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora atau pemasangan stiker atau yang lainnya. Bupati Jayapura, Habel. M Suwae. Ssos, juga kemukakan hal yang sama, “Jangan terpengaruh dengan kegiatan 1 Desember karena dampaknya pada diri kita masing – masing. Pemerintah tidak menghendaki rakyatnya berurusan dengan hukum dan melakukan tindakan yang melawan negara”.

Dalam rangka 1 Desember, Dewan Adat Sentani menghimbau kepada masyarakat adat Sentani agar tidak melakukan kegiatan apapun karena akan berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Kapolres Jayapura, AKBP Roberth Djoenso, menyampaikan kepada masyarakat Jayapura agar tidak memperingati 1 Desember dengan kegiatan–kegiatan, juga tidak melalui ibadah. Dalam hal ini pihak kepolisian akan bertindak tegas. Hal yang sama juga disampaikan di Timika oleh Kapolres Mimika, Paulus Weterpauw.

Tim gabungan TNI–Polri Merauke menggelar razia dalam rangka 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua. Terkait dengan itu Polres Jayapura menyatakan siaga 1 dengan menyiapkan 600 aparat kepolisian dan dibantu oleh 1 SSK TNI Kodim dan Korem 172/PVT Jayapura.

1 Desember

Sekelompok Masyarakat Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora di lapangan Trikora Abepura. Dalam upaya menurunkan bendera terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan masyarakat. 13 orang menderita luka–luka, 8 dari pihak kepolisian dan 5 dari pihak masyarakat.

Terkait dengan peristiwa pengibaran Bendera Bintang Kejora, Drs. Pilip Karma dan Yusak Pakage, SH ditangkap aparat kepolisian sebagai yang bertanggung jawab atas penaikan bendera tersebut.

Bendera Bintang Kejora dikibarkan di Kampung Farusi di halaman rumah ibu Betseba Adadikam dan juga di halaman Gereja Farusi Distrik Biak Barat namun setelah bernegosiasi dengan Muspida Bendera dapat diturunkan.

2 Desember

Polres Jayapura mencabut status siaga satu pengamanan kamtibmas menjelang 1 Desember.

Drs. Pilip Karma dan Yusak Pakage resmi ditahan di Polresta Jayapura dengan tuduhan makar menaikkan Bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora Abepura. Sebagai protes atas penahanannya, Drs. Pilip Karma mogok makan dan bicara. Sementara 17 Orang yang hadir dalam kegiatan 1 Desember di Abepura dipanggil oleh Polresta Jayapura untuk dimintai keterangan.

3 Desember

International Committee of the Red Cross (ICRC) Sub Delegasi Papua mengadakan Audensi dengan Pangdam XVII/Trikora, Mayjen Nurdin Zainal MM. ICRC menyampaikan minatnya untuk datang ke Mulia. Pangdam Trikora menyambut baik rencana itu dan mempersilakan ICRC datang ke Mulia.

5 Desember

Drs. Pilip Karma mogok makan dan bicara sebagai protes atas tindakan aparat keamanan terhadapnya juga terhadap rekannya, Yusak Pakage, SH.

6 Desember

KPU Provinsi Papua, daerah dan kota dipanggil oleh Pemerintah Pusat untuk memberikan masukan bagi Peraturan Pemerintah No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sedang digodok. Hal ini penting bagi pemerintah untuk melihat kedudukan UU No.21 tahun 2001 dalam kaitannya dengan pemilihan kepala Daerah dan Provinsi Papua.

20 Desember

Pihak Kejaksaan Jayapura melakukan pemeriksaan terhadap YA pimpro Reboisasi Hutan dan Lahan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura yang diduga menyalagunakan dana sebesar 1, 2 M.

27 Desember

Tim Kajari Biak–Numfor siap melaporkan hasil pemeriksaannya Kajati Papua atas dugaan penyalagunaan dana rutin DPRD Biak–Numfor periode 1999 – 2004, dalam waktu dekat.

28 Desember

Gubernur Papua Drs. JP. Salossa menegaskan, percepatan penanganan tindak korupsi merupakan salah satu program strategis dan prioritas bagi Pemerintah Provinsi Papua. Dan ini juga merupakan perjanjian bersama seluruh provinsi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan itu semua pejabat di Papua harus menyerahkan daftar kekayaannya.

B. Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1 Oktober

Masyarakat kota Wamena kembali mengeluhkan kekurangan bahan bakar khususnya minyak bensin. Hal ini memaksakan pihak pengelola bahan bakar di Wamena untuk mengambil kebijakan untuk membagi porsi antara kendaraan umum yang beroperasi di dalam Kota dan di luar Kota Wamena. Yang beroperasi di dalam kota hanya disiapkan 15 liter per mobil, sedangkan yang beroperasi di luar kota diberikan jatah 20 liter per mobil.

Sementara di Sentani–Jayapura, kekurangan minyak bensin sudah mulai diatasi; setiap kendaraan yang sebelumnya hanya boleh membeli 5 liter, kini boleh membeli lagi dalam jumlah yang banyak walaupun masih tetap antre.

Kabupaten Mimika – Timika mengalami kekurangan semen. Keluhan ini bukan saja disampaikan oleh konsumen tetapi juga oleh pengusaha; toko – toko bangunan. Timika mengalami kekurangan seperti ini untuk kedua kalinya.

Empat kapal ditangkap di perairan Sorong karena tidak memiliki dokumen resmi. Dari empat kapal tersebut, tiga diantaranya berbendera Indonesia sedangkan yang lain berbendera Filipina.

3 Oktober

Kanwil BKKBN bekerja sama dengan, KPAD, ASA, MUI dan tokoh agama Islam mengadakan lokakarya HIV/AIDS di Aula Balitbang Kanwil BKKBN Provinsi Papua. Keterlibatan para tokoh agama dalam pembinaan umat sebagai upaya penanggulangan bahaya HIV/AIDS sangat dibutuhkan saat ini dengan tetap mengharapakan bantuan dari semua pihak di Papua.

5 Oktober

Kabupaten Nabire mengalami kelangkaan bahan bakar minyak. Setelah tiga hari masyarakat mengalami kekurangan minyak tanah dan belum teratasi kini minyak bensin juga mulai mengalami kelangkaan.

6 Oktober

Pemerintah Kota Kabupaten Jayapura akan segera menggelar Operasi Yustisi untuk mengganti masuk-keluarnya masyarakat Kota Jayapura yang terkesan tidak beraturan.

8 Oktober

Menurut Sekda Provinsi Papua Andi Baso Bassaleng, formasi PNS tahun 2004 – 2005 Provinsi Papua akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Orientasi pada tahun ini lebih banyak diarahkan kepada tenaga medis dan guru dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi.

13 Oktober

Semakin tingginya penyebaran HIV/AIDS di Papua mendorong Gubernur Papua Drs. JP Solossa, menginstruksikan kepada instansi terkait dan masyarakat Papua untuk bersama-sama perang menghadapi HIV/AIDS di Papua.

Kelangkaan minyak tanah mendorong ibu-ibu di Timika melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mimika. Menurut anggota DPRD Mimika, Derek Waita, "Kalau menurut Jobber Pertamina Kuota cukup tetapi dalam kondisi begini masyarakat masih juga mengadu berarti ada indikasi ketidakberesan penyaluran minyak tanah ke masyarakat". Maka pihak DPRD Mimika akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga Jobber Pertamina untuk menanyakan duduk persoalan yang sebenarnya.

Ancaman kerusakan lingkungan hidup di Papua mulai menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu pemerintah bersama LSM dan Masyarakat Adat membentuk Forum Kemitraan Pengelolaan Lingkungan hidup. Guna menyusun *draftnya* Bapedalda Provinsi Papua mengadakan diskusi sehari di Hotel Relat Indah. Pembentukan forum kemitraan pengelola lingkungan hidup sendiri merupakan kelanjutan dari kesepakatan antara Bapedalda Provinsi Papua dengan PT. Freport Indonesia, Asosiasi Perusahaan Hutan Indonesia, ISTJ dan *WWF for Natural Bioregional Sahul* yang ditandatangani 6 Maret 2001 di Jakarta.

15 Oktober

Membangun jalan antar daerah di Papua merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua sejak tahun 2001. Secara menyeluruh jalan yang kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi; (1) Jayapura–Wamena, (2) Sorong–Ayamuru, (3) Nabire–Enarotali, (4) Jayapura–Sarmi, (5) Timika Pomako, (6) Manokwari–Bintuni, (7) Fakfak–Kokas, (8) Fakfak–Bomberay, (9) Wamena–Mulia, (10) Serui–Saubeba, (11) Jayapura–Skow–PNG. Menurut perhitungan Kasubdin Bina Marga Dinas PU Provinsi Papua, Ir. Mikael Kambuaya, dana yang dibutuhkan untuk 11 jalan tersebut sebesar Rp. 3 Triliun.

17 Oktober

Kabupaten Teluk Wondama akan menambah formasi PNS tahun 2004 sebanyak 175 orang sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut Bupati Teluk Wondama, Albert. H. Torey, SH tenaga-tenaga yang dibutuhkan oleh Kabupaten Teluk Wondama: di bidang kesehatan, pendidikan dan tenaga-tenaga profesional.

1 November

Secara Nasional akan diselenggarakan Pendaftaran CPNS. Kotamadya Jayapura dan Kabupaten Jayapura telah membuka pendaftaran. Sementara di Kabupaten Yahukimo para pendaftar CPNS masih kurang dan belum mencukupi formasi yang dibutuhkan.

DPRD Kota Jayapura setuju jika Perda miras ditinjau kembali mengingat dampak negatif bagi masyarakat dan terutama generasi sangat terasa. Dalam kaitannya dengan itu Lanud Jayapura dalam upacara HUT POM AU memusnahkan ratusan minuman hasil sitaan POM AU.

Masyarakat Kota Wamena mengeluh mengenai pelayanan PLN Ranting Cabang Wamena yang sering padam yang mengakibatkan banyak alat-alat elektronik menjadi rusak. Masyarakat sangat heran karena keluhan yang sama pernah disampaikan bahkan sampai ke PLN Provinsi tetapi tidak ada tanggapan.

Demo sudah menjadi pemandangan biasa di Kabupaten Jayawijaya belakangan ini. Jika masyarakat melakukan demonstrasi itu sudah biasa. Kini giliran pengusaha. Para pengusaha menuntut agar Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera membayar utang-utang mereka sebesar 150 miliar.

2 November

Kabupaten Manokwari membuka pendaftaran CPNS untuk 292 orang. Tenaga kerja yang dibutuhkan pada periode ini diprioritaskan bagi tenaga guru dan kesehatan.

Sebagai tanggapan atas aksi demo para pengusaha di Wamena, Kajari Wamena mengirim surat kepada Kajati Papua dengan tembusan kepada Kejaksaan Agung RI agar segera memperhatikan pengaduan pengusaha karena ada indikasi korupsi.

3 November

UGD RSUD Abepura terpaksa ditutup karena jasa para dokter sudah setahun tidak dibayar lagi. Sebagai akibat masyarakat yang mau berobat terpaksa harus menunggu lama dan akhirnya pulang. Menanggapi aksi para dokter, Direktur RSUD Abepura, A.K. Marlisa, SP.R, mengatakan pihaknya akan berusaha membicarakan masalah ini dengan Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Papua.

Pendaftaran CPNS Pemerintah Provinsi Papua dibuka. Formasi CPNS yang akan diisi sebanyak 231 lowongan dengan rincian, tenaga kesehatan 155 orang, tenaga teknis lain seperti S1, D3 dan SMK berjumlah 76 orang.

Kabupaten Teluk Wondama membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil formasi 2004 sebanyak 175 orang, dengan rincian, guru 74 orang, kesehatan 38 orang dan tenaga teknis dan umum 63 orang.

5 November

Panitia CPNS Dephum dan HAM Provinsi mendapat peringatan keras dari Kepala Kantor Ngusman, Bc, IP, SH untuk tidak melakukan KKN. Bahwa siapa yang ketahuan melakukan KKN akan ditidak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bisnis Kayu gaharu di Assue Distrik Eci Kabupaten Mappi sangat menjanjikan bagi masyarakat setempat. Namun dengan maraknya perdagangan Gaharu, marak pula perdagangan manusia, Pekerja Seks Komersial. Dalam kaitannya dengan peningkatan penyakit HIV/AIDS, telah ditemukan 35 penderita di Assue, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP – KAM). Dalam kaitannya dengan situasi Assue SKP–KAM

mengancam untuk melakukan somasi terhadap Pemerintah Kabupaten Mappi, karena menilai banyak persoalan tidak ditangani malah dibiarkan saja.

Di Timika para pendaftar CPNS bertumpah-ruah melebihi target. Untuk mengatasinya panitia akan mengusulkan penambahan formulir pendaftaran sebanyak 500. Sementara di Biak dari formasi 2004 dibutuhkan 240 tenaga sedangkan yang mendaftar telah mencapai 6000-an orang.

8 November

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat bawah, Yayasan Pengembangan Masyarakat Papua (YPMP) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua menyelenggarakan pelatihan Pengembangan Manajemen Kesehatan. Pelatihan ini ditujukan kepada para LSM yang bekerja di bidang kesehatan di seluruh Papua. LSM dalam hal ini dinilai sebagai kelompok yang lebih dekat dan benar-benar mengetahui keberadaan masyarakat sehingga pelayanannya akan tepat sasaran. 3 pokok penting yang disampaikan selama pelatihan: (1) Prinsip-prinsip manajemen kesehatan, (2) Strategi pelayanan kesehatan di Papua dan (3) Teknik pelayanan sesuai dengan pendekatan swadaya masyarakat.

Dalam pertemuan antara mantan anggota DPRD periode 1999–2004 dengan pemerintah Kabupaten Jayawijaya di kediaman Bupati David Hubi, Bupati berjanji akan membayar hak-hak anggota DPRD periode lalu yang kini masih tertunda.

Karena janji pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menaikkan honor guru bantu pada bulan Januari 2004 sampai kini belum terealisasi. Untuk itu Koordinator guru bantu, Nunik meminta DPRD Kabupaten Jayapura memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah untuk menjelaskan duduk persoalannya.

9 November

KSAL Laksamana Bernart Kent Sodakh menanggapi UU TNI yang baru disahkan bahwa salah satu langkah TNI adalah meninggalkan bisnis-bisnis TNI dan secara khusus kepemilikan bisnis TNI-AL.

Maraknya penerimaan CPNS juga terasa di Kabupaten Jayapura. Ribuan pelamar berusaha merebut 203 kursi untuk formasi yang tersedia. Ada sinyalemen akan terjadi praktek suap dalam kegiatan penerimaan CPNS nanti. Dalam kaitannya dengan isu korupsi yang sedang menjadi perhatian Pemerintah Presiden Yudhoyono, pihak pemerintah Jayapura mengeluarkan sikap tegas bahwa akan menindak tegas pihak panitia. Yang ketahuan melakukan praktek suap akan dipecat.

12 November

Massa Forum Peduli Kasus Assue melakukan aksi demo di Kantor DPRD Papua di Jayapura. Kepada Dewan massa menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap bisnis Gaharu dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Tim perundingan Assue ketika mengadakan negosiasi dengan pihak DPRD bersepakat untuk mengadakan dialog dengan Muspida Papua pada tanggal 17 November 2004.

Kepada Wagub Papua Konstant Karma, Bupati Puncak Jaya, Drs. Elieser Renmaur dan Ketua DPRD Puncak Jaya, Thimotius Murib menyampaikan bahwa kerugian yang dialami akibat kasus Mulia mencapai Rp. 19 miliar lebih.

17 November

Massa Forum Peduli Assue kembali mendatangi kantor DPRD Papua untuk berdialog dengan para Muspida Papua. Pihak Polda Papua dan Kodam XVII/Trikora

mengakui keterlibatan aparatnya sebagaimana dilaporkan SKP Keuskupan Merauke. Kepada aparatnya masing-masing telah diambil tindakan. Dalam dialog disepakati untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk segera ke lapangan. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur Masyarakat Adat, LSM, Gereja, DPRD Papua dan Mahasiswa.

DPRD Papua dan utusan Forum Peduli Assue berapat untuk mengisi keanggotaan TPF, terutama dari utusan DPRD Papua. 2 anggota DPRD Papua yang ditunjuk sebagai anggota TPF masing-masing Abraham Kuruwaib dan Yohanes Kuniwara. Sebagai hasil keputusan rapat ditetapkan jumlah anggota tim TPF sebanyak 15 orang.

23 November

Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara serempak di seluruh Indonesia juga di Papua. Gubernur Papua berharap testing tahun ini akan berjalan lancar dan bebas dari KKN. Sementara itu, Badan Kepewagaian Negera (BKN) menjamin tidak ada kebocoran soal testing.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari, Drs. Benny Boneftar mengatakan peserta yang akan mengikuti ujian CPNS sebanyak 930 orang. Sementara itu Ketua Panitia seleksi CPNS Kabupaten Biak-Numfor, Drs. Izaak Kapisa mengatakan bahwa 7243 orang pendaftar CPNS akan mengikuti ujian untuk merebut 240 formasi.

Warga eks pasar Ampera yang beberapa bulan lalu tergusur minta kepada pemerintah agar memperpanjang *deadline*; padahal warga diberi batas waktu sampai dengan tanggal 5 Desember 2004. Kendala yang dihadapi warga hingga belum pindah adalah bahwa mereka tidak tahu harus pindah kemana.

24 November 2004

Sekda Provinsi Papua, Drs Andi Baso Bassaleng membuka seleksi CPNS tingkat Provinsi Papua. Menurut Andi Baso pada penerimaan PNS kali ini Provinsi Papua mendapat jatah dari pemerintah pusat 4.295 PNS, dengan rincian tenaga medis sebanyak 1.125 orang, tenaga guru 1.727 orang, dan tenaga teknis lainnya sebanyak 1.440 orang. Tiga daerah yang tidak melaksanakan penerimaan CPNS tahun 2004 yaitu Kabupaten Paniai, Kabupaten Waropen dan Kabupaten Supiori.

Ujian seleksi di beberapa kabupaten seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Jayapura terpaksa diundur karena terjadi keterlambatan pendistribusian soal ujian. Mengenai keterlambatan pendistribusian soal ini diakui oleh Kabag Kepegawaian Provinsi Papua, Drs. Yesaya Buinei.

Sementara itu ujian CPNS di Kabupaten Biak diwarnai dengan adanya aksi merobek-robek soal ujian oleh sekitar 30 orang CPNS sehingga ujian terpaksa ditunda. Aksi ini terjadi karena para oknum CPNS tersebut merasa kesal dengan keterlambatan distribusi soal ujian sementara mereka telah menunggu selama 5 jam tanpa ada kejelasan dari pihak panitia.

Sementara itu ujian tertulis CPNS untuk Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo secara serentak dilaksanakan di Kota Wamena. Dengan dijaga ketat oleh aparat dari Polres ujian tersebut berjalan aman dan lancar.

Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Jayawijaya Drs. Demianus W. Siep mengatakan untuk Kabupaten Jayawijaya hanya mendapat alokasi

penerimaan 294 orang terdiri dari tenaga guru 175 orang, tenaga medis 59 orang dan tenaga umum 60 orang, sedangkan peserta tes seluruhnya berjumlah 2403 orang.

Sementara itu Asisten I Kabupaten Yahukimo, Drs. Husein Lamanassa mengatakan peserta ujian untuk Kabupaten Yahukimo berjumlah 1.375 orang, sedangkan formasi yang diperebutkan hanya sebanyak 275, terdiri dari 175 tenaga guru, 73 orang tenaga kesehatan, dan 27 orang tenaga administrasi umum.

Menanggapi adanya keterlambatan soal ujian di beberapa daerah seperti Papua, Jambi dan Jawa Timur, Koordinator Panitia Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS Tingkat Nasional mengatakan ujian susulan akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2004.

26 November

Tepat pukul 11.25 WIT, kota Nabire diguncang gempa dengan kekuatan 6,9 Skala Richter (SR) dengan pusat gempa berjarak 17 KM sebelah selatan kota Nabire. Tercatat 13 orang tewas, 33 orang luka berat dan 150 orang luka ringan. Pelaksana Harian Stasiun Meteorologi dan Geofisika Frans Kaisepo Biak yang juga membawahi Nabire, Bambang Hargiyono, S.Si mengatakan pusat gempa berada di 3,52 ° LS, 135,47° BT dengan kedalaman gempa 33 km.

25 November

Penyeludupan 450 ekor kura-kura moncong babi dari Merauke-Jakarta digagalkan oleh petugas Konservasi Sumber Daya Alam di bandara Mopah Merauke.

26 November

Warga BTN Tanah Hitam Abepura mendatangi kantor Cabang PDAM Abepura karena selama hampir lima bulan tidak mendapatkan layanan air bersih. Selain membawa pamflet, mereka juga membawa jerigen dan ember kosong yang dijejer di depan loket pembayaran retribusi air.

29 November

Wakil Ketua Komisi A Kotamadya Jayapura, Abisai Rollo, minta agar Perda Miras ditinjau kembali mengingat penjualan miras yang marak dimana-mana, juga mengingat tingkat kriminalitas cukup tinggi karena konsumsi miras.

30 November

Menanggapi kasus Assue yang disuarakan oleh Forum Peduli Assue, Kapolsek Assue dan 10 anggotanya akan diganti. Langkah ini diambil Polda Papua setelah sebelumnya menurunkan tim investigasi untuk mengecek kebenaran keterlibatan aparat kepolisian dan kinerjanya di lapangan.

1 Desember

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Assue, Kapolsek Assue diganti melalui serah terima dari Ipda Rianto kepada Ipda Leo Fordus Sirken.

6 Menteri berkunjung ke Nabire untuk melihat secara langsung korban bencana alam. Masyarakat sangat kecewa karena tidak dapat berdialog langsung dengan para menteri karena dihalang oleh aparat keamanan.

3 Desember

Menanggapi penerimaan PNS di Kabupaten Jayapura, Ketua DPD KNPI, Frist Yom meminta kepada pihak pemerintah Jayapura untuk memprioritaskan putra asli daerah Jayapura. Kepada pemerintah diusulkan 75-80% putra asal daerah

sedangkan 15-20% boleh diisi oleh yang datang dari luar Papua dengan syarat sudah lama di Papua.

5 Desember

Menjelang hari raya Natal Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura mengingatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Jayapura untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) para karyawan. Kepada Dinas Tenaga Kerja juga meminta kepada semua karyawan untuk melaporkan ke Tenaga Kerja bila THR-nya tidak di bayar.

6 Desember

Mantan kapolres Sorong, AKBP Faisal Abdul Nasir yang terlibat *illegal logging* di Sorong diserahkan ke Kejati Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua menerima bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Jepang melalui Deputy Resident Representative JIC, Mituo Hirano, untuk korban bencana alam di Nabire. Bantuan diterima langsung oleh Gubernur Drs. J.P. Solossa.

Dalam tiga bulan terakhir Lantamal V Papua menangkap 8 kapal ikan di perairan Papua yang sedang melakukan *illegal fishing* juga mengagalkan penyeludupan vanili dari PNG.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai melalui APBN dan APBD tahun 2004 telah berakhir namun masih banyak instansi yang belum melaporkan kegiatan atau proyeknya. Dalam rapat evaluasi di Kantor BP3 Provinsi Papua, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian BP3D (Badan Pengawasan dan Perencanaan Perencanaan Daerah) Drs. Waryono.

Himpunan Pelajar Mahasiswa Jayawijaya menanyakan hasil audit keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Tim Audit Provinsi Papua yang sampai sekarang belum ada kejelasannya kepada masyarakat.

14 Desember

Kabupaten Kerom mencanangkan penanaman padi ladang Sito Bagandit seluas 232 Ha, guna meningkatkan penghasilan masyarakat.

Pelajar dan mahasiswa Jayawijaya di asrama-asrama mulai kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara air, telepon dan listrik telah disegel. Kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya para pelajar dan mahasiswa mempertanyakan bantuannya.

20 Desember

Masyarakat adat Abenaho dan masyarakat Kurulu datangi pemerintah Kabupaten Jayawijaya menuntut hak ulayat tanah yang dipakai untuk pembuatan jalan trans Wamena-Jayapura. Pemerintah Jayawijaya yang telah berjanji akan membayar hak masyarakat belum juga memberikan kejelasan mengenai pembayaran itu. Kepada masyarakat Pimpro Stevanus Bosawer mengatakan bahwa pemerintah akan membayar tetapi masih menunggu perintah dari Bupati Hubi. Mengenai pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil.

Puluhan petugas PPK dari 5 Distrik di Jayawijaya melakukan aksi demo di kantor KPUD Jayawijaya. Para demonstran menuntut pembayaran honor selama mereka bertugas. Pihak KPUD yang menemui demonstran mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu Bupati Hubi yang sedang berada di luar daerah.

28 Desember

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tolikara Alfius Lambe minta kepada pemerintah Tolikara untuk lebih memprioritaskan putra-putri Tolikara dalam penerimaan pegawai negeri pada tahun ini.

C. Hak atas kesehatan

6 Oktober

Kasubdin Dinas kesehatan Jayawijaya, Etty Ubra, mengakui ketidakberdayaannya melayani masyarakat karena persediaan obat dan fasilitas penyimpanan obat dan lebih daripada itu dana operasional untuk kegiatan-kegiatan seperti imunisasi nasional tidak ada.

13 Oktober

Semakin tingginya penyebaran HIV/AIDS di Papua mendorong Gubernur Papua Drs. JP. Solossa, menginstruksikan kepada instansi terkait dan masyarakat Papua untuk bersama-sama perang melawan HIV/AIDS di Papua.

19 Oktober

HIV/AIDS terus menyebar ke berbagai wilayah di Papua. Menurut kapala Rumah Sakit Umum Mulia, terdapat satu orang yang kini terinfeksi HIV / AIDS di Kota Mulia.

22 Oktober

mengamati laju penyebaran HIV/AIDS di Papua dan khususnya di Merauke, pemerintah Merauke terus melakukan upaya-upaya, untuk mengontrol dan menekan perkembangannya. Untuk itu secara khusus Dinas kesehatan Merauke kini sedang membangun 4 gedung untuk Pokja HIV/AIDS, terdiri dari: ruang gawat darurat, ruang khusus pokja HIV/AIDS, ruang perawatan bagi yang positif AIDS, dan ruang jenazah. Diperkirakan semua ruangan akan rampung Januari 2005.

4 November

Melihat laju penambahan angka penderita HIV/AIDS di Papua, Wagub. Constant Karma, menyerukan kepada seluruh umat beragama di Tanah Papua untuk melakukan tobat massal.

14 Desember

Warga Distrik Muara Tami Kotamadya Jayapura, kekurangan obat-obatan, juga fasilitas yang kurang memadai, sebagaimana dikeluhkan masyarakat Koya Barat.

D. Hak-hak perempuan

25 November

Untuk meperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, secara serentak diadakan Kampanye 16 Hari Kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Sementara itu di Jayapura kaum perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan untuk Zona Damai di Papua (KPZDP) juga mengadakan Kampanye 16 Hari tersebut dengan mengambil tema "Melalui Hari Internasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan kita galang dukungan masyarakat untuk membebaskan perempuan Papua dari bahaya kekerasan rumah tangga, miras, HIV/AIDS dan kekerasan seksual". Mengawali rangkaian kampanye tersebut, KPZDP menggelar aksi bagi bunga di kota Jayapura dan Sentani.

Pada hari yang sama jenazah Magdalena Marani diusung massa ke Polda Papua minta pertanggungjawaban instansi tersebut. Almarhumah Magdalena diduga meninggal akibat penyiksaan oleh aparat kepolisian di Polresta Jayapura karena dituduh mencuri uang milik salah satu aparat kepolisian.

Kapolda Papua Brigjen Polisi D. Sumantyan.H.S,SH meminta maaf kepada kaum perempuan di Indonesia dan di Papua secara khusus karena ulah salah satu aparatnya yang telah menodai peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pihaknya berjanji akan segera melakukan proses hukum terhadap oknum aparatnya yang terlibat.

26 November

Polda Papua membentuk Tim Investigasi berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap Magdalena Marani sehingga menyebabkan korban tewas. Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol. Drs. Subagyo, HS mengatakan dirinya ditunjuk sebagai ketua Tim Investigasi tersebut.

1 Desember

5 aparat kepolisian tersangka penyiksaan hingga meninggalnya Magdalena Marani dalam tahanan kepolisian Polresta Jayapura dihadapkan ke Komisi Sidang Disiplin Polri di Mapolda Papua.

2 Desember

Berkas tersangka penyiksaan Magdalena Marani hingga meninggal diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Papua.

3 Desember

6 aparat kepolisian kasus penganiayaan hingga meninggalnya Magdalena Marani di Polresta Jayapura dinyatakan bersalah oleh Komisi Sidang Disiplin Polri di Mapolda Papua. Sebagai saksi atas tindakan mereka diberikan teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 1 periode, penundaan kenaikan pangkat untuk 1 periode, dan menjalani masa kurungan selama 14 hari. 3 dari 6 aparat itu diajukan oleh hakim ke sidang kode etik kepolisian.

19 Desember

LP3A-P menyelenggarakan Dialog Interaktif dari Auditorium TVRI Jayapura. Secara garis besar disinggung mengenai kekerasan terhadap perempuan di Papua yang cukup tinggi. Seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, dan penindasan. Dari data LP3A-P, tahun 2003 terdapat 61 kasus; 12 kasus kekerasan fisik, 49 kasus kekerasan seksual, (15 kasus pencabulan, 7 kasus percobaan pemerkosaan, dan 27 kasus pemerkosaan) dan hampir semua kasus ini terjadi ketika pelakunya mabuk.

20 Desember

Di Perumnas Yotefa Graha Waena, seorang suami menganiaya istrinya hingga dilarikan ke UGD RSUD Abepura.

22 Desember

Seorang pria mencabuli bocah 9 tahun di Hamadi-Jayapura. Pelaku pencabulan adalah tetangga korban.

29 Desember

Guru SD Inpres Manimeri III Kampung Bumi Sanirari Kabupaten Bintuni mencabuli 8 muridnya. Para korban rata-rata berusia 8–10 tahun. Perbuatan bejat ini dilakukan ketika akan memberikan les matematika. Kejadian sendiri sudah terjadi pada bulan Oktober dan baru dilaporkan ke aparat kepolisian pada bulan Desember.



Bagian II

Analisis Perkara

A. Hak Sipil–Politik

A.1. Hak berpartisipasi dalam politik

Pemilihan Umum tahun 2004 di Papua mencatat sejarah yang cukup mengesankan. Masyarakat sangat antusias mengambil bagian secara nyata dalam pencalonan–pencalonan anggota legislatif. Berbagai ketidakberesan¹ masih terlihat di seluruh kabupaten di Papua. Anggota terpilih masih saja dipersoalkan. Masyarakat memprotes KPUD Kabupaten dan KPU Provinsi karena merasa pihaknya tidak terwakili. Sementara caleg terpilih yang merasa terancam karena diteror terpaksa harus mengundurkan diri sebagai anggota legislatif. Untuk menyelesaikan berbagai ketidakberesan kebijakan segera diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Gubernur mengeluarkan SK yang ternyata menambah keruhnya suasana. Caleg yang merasa pihaknya dirugikan memperkarakan Gubernur ke pengadilan².

Di sebagian besar Kabupaten pelantikan anggota legislatif baru mengalami penundaan beberapa kali. Penundaan sendiri sebenarnya tidak terlepas dari sejumlah ketidakberesan di atas. Terlepas dari itu ada satu gejala dalam masyarakat yang patut diberi perhatian. Ada semacam pemindahan profesi dalam masyarakat Papua. Mereka meninggalkan profesi sebelumnya sebagai guru, perawat, kepala suku, dll, dan ingin menjadi seorang politikus. Tidak bisa disangkal bahwa mengambil bagian secara nyata dalam berpolitik adalah hak setiap manusia. Namun dari segi kecakapan menyangkut tuntutan dunia perpolitikan modern dengan segala mekanisme yang ada, kenyataan ini akan menjadi persoalan dan tentu saja ini akan merugikan masyarakat Papua. Jadi wajar jika para caleg terpilih semestinya merupakan orang-orang yang mampu menciptakan perubahan lewat keahliannya, bukan sebagai boneka yang mudah dipertunjukkan oleh pihak lain hingga perubahan yang diharapkan oleh masyarakat Papua tidak tercapai.

A.2. Penegakan hukum

Program seratus hari Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum menunjukkan perubahan berarti bagi dunia hukum di Papua. Khusus untuk kasus–kasus makar selalu menimbulkan banyak tanda tanya. Para penegak hukum kadang–kadang memperlihatkan sikap dan tindakan yang sebenarnya diketahui sendiri sebagai tindakan yang salah secara hukum karena memvonis terdakwa sebelum proses hukum berakhir dan tidak menghormati azas praduga tak bersalah. Jika benar penegak hukum di Papua adalah bagian dari pemerintah SBY, sudah saatnya bekerja lebih serius dan profesional. Artinya penegak hukum mampu membedakan kebenaran hukum dan *stereotype*; tidak menghukum orang hanya karena dia berasal dari Pegunungan Tengah yang dicap sebagai masyarakat separatis-TPN/OPM. Pendekatan aparat penegak hukum seperti itu jauh dari kebenaran hukum, berpihak dan tidak objektif. Pantaslah penasihat hukum kasus makar Bolakme kecewa atas vonis PN Wamena 15 tahun dan 20 tahun penjara terhadap 2 kliennya. Tentu saja masyarakat tidak bisa dipersalahkan jika mulai

¹ Baca Triwulan Juli – September 2004 ; Bagian II, Analisis Perkara, Hak Sipil – Politik: Hak berpartisipasi dalam politik, alinea 1.

² Caleg Kabupaten Sarmi mengugat Gubernur Papua ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pada tanggal 8 Oktober, dengan No. 04/U/Tun/2004/PTUN.JPR, karena menerbitkan SK Gubernur, No. 2 Tahun 2004, tentang Pengangkatan dan Pelantikan anggota DPRD Sarmi periode 2004-2009.

menilai bahwa apa yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap terdakwa makar melulu adalah kesengajaan. Tahun 2003 LP Wamena memindahkan tahanan Wamena Berdarah ke Makassar yang kemudian tertahan di LP Abepura. Pada tahun 2004 sekali lagi LP Wamena memindahkan tahanan pembobolan gudang senjata Kodim Wamena ke Makassar. Para aparat LP Wamena juga memindahkan tahanan tanpa koordinasi dan prosedur hukum yang benar³. Tindakan ini tentunya membingungkan selain pihak keluarga terdakwa, pendamping hukum terdakwa, juga instansi aparat penegak hukum lain, seperti pihak Kehakiman dan Ham Provinsi Papua.

Sementara itu, kasus makar Bolakme 6 November 2003 dan Mariedi berdarah 20 April 2004 sedang dalam proses hukum. Namun dengan pengalaman bagaimana penegak hukum mengambil tindakan terhadap para terdakwa di Wamena menimbulkan pertanyaan: apakah tindakan yang sama akan diperlakukan juga pada kasus Mariedi dan Bolakme.

Beberapa kasus dimana masyarakat mengadakan perlawanan fisik dengan aparat keamanan cepat sekali diklasifikasikan sebagai tindakan separatis. Perlawanan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Wasior dan Mariedi Kabupaten Teluk Bintuni menjadi pengalaman buruk bagi masyarakat terpencil. Ada semacam pola *justifikasi* penegak hukum yang dipakai secara umum bahwa penegak hukum pasti benar. Maka ketika masyarakat di daerah terpencil berselisih dengan aparat penegak hukum, apalagi dengan menggunakan alat, walaupun tanpa melihat duduk persoalannya langsung saja dicap sebagai pemberontak, TPN/OPM.

A.3. Pemekaran lawan Otsus

Status hukum Irian Jaya Barat (IJB) tetap saja mendua meskipun Mahkamah Konstitusi telah membatalkan UU No.45 Tahun 1999 namun praktek pemerintahan IJB tetap berjalan.⁴ Bisa saja putusan MK ini sebagai jalan tengah untuk menghindari konflik antar masyarakat. Tetapi sikap kemenduaan seperti ini jelas tidak membantu siapa pun baik itu pihak Provinsi Papua, pihak IJB maupun Pemerintah Pusat. Dari segi Membangun Papua dari ketertinggalannya, akan menjadi sulit karena waktu dan tenaga dihabiskan hanya untuk menyelesaikan perselisihan pemekaran Provinsi Papua. Tidak ada waktu yang cukup untuk mulai secara serius memikirkan dan merencanakan sesuatu untuk menjawab kebutuhan masyarakat mengejar ketertinggalannya. Dari segi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tetap menggambarkan citra hukum negara kita yang belum ada perubahan berarti.

Sementara tanggapan masyarakat Papua terhadap pemerintah baru yang semula

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi
No.018/PUU-I/2003
Tanggal 11 November 2004

1. Tuntutan judicial review UU No. 45 tahun 1999 dikabulkan.
2. UU No. 45 tahun 1999 tentang pemekaran Irian Jaya Barat (IJB), Irian Jaya Tengah (IJT), Kota Sorong, Kab. Mimika, Puncak Jaya dan Kab. Paniai dinyatakan bertentangan dengan UUD'45.
3. Sejak dibacakan /diucapkannya keputusan ini, maka UU No. 45 tahun 1999 dinyatakan batal demi hukum.
4. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk dan berjalan sejak berlakunya UU No.45 tahun 1999 tetap berjalan dan sah, sedangkan Provinsi Irian Jaya Tengah (IJT) gugur dan akan dimekarkan setelah diamanatkan dalam UU Otsus.
5. Dalam tempo 30 hari akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPU) untuk memayungi Provinsi Irian Jaya Barat.
6. Keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh Pejabat Negera baik di tingkat pusat maupun di daerah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

³ LP Wamena tidak memberitahu pihak keluarga dan pihak kuasa hukum terpidana.

⁴ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 018/PUU-I/2003

memberikan harapan kini mulai melihat dengan sebelah mata. Mungkin ini akan menjadi satu hambatan besar dalam menata kebersamaan sebagai bangsa.

Setelah menunggu begitu lama akhirnya Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada tanggal 23 Desember 2004. Dari segi pemenuhan janji sewaktu berkampanye, pengesahan MRP merupakan suatu keberhasilan presiden SBY menjawab janjinya kepada masyarakat Papua. Tetapi keberhasilan ini tidak terlalu mulus, karena toh masyarakat terus mempersoalkan isi MPR baik itu menyangkut rumusan maupun cakupan wilayah administrasi pemerintah mengingat UU No. 45 tahun 1999 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

A.4. Kebebasan berpendapat, Aspirasi “M”



Aspirasi “M” kembali mencuat dalam kaitannya dengan perayaan Hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 2004. Muspida Papua mengeluarkan seruan tegas kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak melakukan kegiatan apapun dalam rangka 1 Desember, termasuk kegiatan doa. Larangan yang sama juga disampaikan pihak Kepolisian Papua dengan mengeluarkan maklumat 1 Desember 2004. Seruan ini kemudian diserukan juga sampai ke tingkat daerah-daerah. Sementara itu Dewan Adat Sentani merupakan satu-satunya Dewan Adat di Papua yang juga mengeluarkan seruan kepada masyarakatnya untuk tidak melakukan kegiatan apapun menyelang 1 Desember 2004.

Cukup beralasan bila Dewan Adat Sentani mengeluarkan seruan melarang memperingati 1 Desember 2004. Beberapa tahun terakhir wilayah Adat Sentani terus menjadi wilayah yang tegang karena menjadi pusat kegiatan perayaan 1 Desember. Dua unsur yang menjadikan Wilayah Adat Sentani selalu dipilih menjadi pusat kegiatan: **pertama**, karena di Sentani terdapat kediaman Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) almarhum Theys Eluay dan **kedua**, di Sentani terdapat makam Theys Eluay dan Monumen Pelanggaran HAM Bangsa Papua Barat. Sebagai akibat masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan 1 Desember selalu merasa ketakutan, tidak aman menjalani rutinitasnya setiap hari.

Selama kampanye Pemerintah SBY berjanji menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua secara lebih serius, baik itu menyangkut kesejahteraan maupun perpolitikan di Papua. Terhadap persoalan politik Papua pemerintah tidak akan membuka pintu kompromi. Semua kegiatan dalam rangka kemerdekaan Papua harus segera ditiadakan. Tidak heran jika kemudian Muspida Papua dan secara khusus Kepolisian Papua mengeluarkan seruan melarang segala aktifitas dalam rangka 1 Desember. Izin untuk melakukan kegiatan apapun tidak ditolerir lagi. Dan barang siapa melanggar akan dikenakan sanksi hukuman. Larangan yang melakukan kegiatan 1 Desember bukan sekedar sebagai suatu langkah pemerintah menghentikan aspirasi politik masyarakat Papua yang berbeda dengan pemerintah tetapi lebih dari itu semacam pola untuk menutup pintu kebebasan dan demokrasi masyarakat Papua.

Walaupun merasa terjepit, sekelompok masyarakat Papua tetap menyelenggarakan kegiatan 1 Desember sambil mengibarkan Bendera Bintang Kejora seperti di Biak dan Jayapura. Tokoh aspirasi “M” yang cukup mencolok pada tahun ini Pilip Karma akhirnya ditangkap bersama rekannya Yusak Pakage dengan dakwaan sebagai koordinator kegiatan 1 Desember di Abepura Kota Jayapura.

A.5. Komitmen memberantas Korupsi

Komitmen Pemerintah SBY untuk memberantas korupsi mempunyai dampak juga sampai ke Papua. Tidak tanggung-tanggung misalnya kasus *illegal logging* yang

pernah menjalani proses hukum kembali dibuka karena dianggap masih berbau KKN di dalamnya. Tidak bisa dianggap remeh, mantan Kapolres Sorong yang telah bertugas di luar Papua digiring kembali ke Kabupaten Sorong untuk menjalani pemeriksaan. Kasus ini kemudian meluas sampai kepada mantan pejabat Wakil Kapolda Papua yang kemungkinan besar akan dihadirkan untuk dimintai keterangannya. Guna mempertegas komitmen pemerintah SBY mengizinkan 6 bupati untuk diperiksa aparat terkait, salah satunya adalah Bupati Nabire, Drs. AP Youw. Tentu saja izin ini punya dampak bagi penegak hukum hingga mampu mengejar para koruptor. Beberapa kasus yang kemudian terangkat ke permukaan antara lain dugaan penyelewengan dana rutin DPRD Biak–Numfor dan penyelewengan dana proyek Reboisasi Hutan dan Lahan sebesar 1,2 M di Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura. Sampai dengan tulisan ini dibuat kasus–kasus ini masih dalam proses pemeriksaan. Ada sejumlah indikasi korupsi lain yang sedang diijak seperti yang disampaikan oleh Kajari Wamena ketika menyurat kepada Kejati dan Kejakung. Apa yang telah dibuat sekarang oleh para penegak hukum adalah langkah bagus yang harus didukung oleh berbagai pihak jika masyarakat Papua ingin mendapat pelayanan yang betul manusiawi dari pemerintah.

Aparat Penegak hukum harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat mengikuti perkembangan berbagai kasus korupsi di Papua yang bukan saja merugikan masyarakat Papua tetapi juga merugikan Negara.

A.6. Peran TNI dan Kepolisian



Peran aparat keamanan pada 3 bulan terakhir tahun 2004 terutama berkaitan dengan 2 kasus; kasus penembakan di Mulia Kabupaten Puncak Jaya dan keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis gaharu di Assue Kabupaten Mappi. Dan seperti 5 tahun terakhir menjelang bulan Desember aparat keamanan sibuk meredam aspirasi politik masyarakat Papua. Namun ada insiden dan peristiwa-peristiwa kecil disela-sela topik–topik di atas yang tidak kalah penting bila mau melihat peran aparat keamanan pada bulan Oktober–Desember 2004.

Tanggapan Pangdam XVII/Trikora pada HUT TNI menanggapi UU TNI tentang pembubaran komando kewilayahan dari Kodim sampai Koramil bahwa di Papua UU itu tidak terlalu berpengaruh karena Papua termasuk wilayah rawan yang patut dicermati. Kerawanan yang dimaksudkan seperti apa yang melaporkan Harian Cepas 13 Oktober bahwa terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap 6 warga sipil di Puncak Jaya oleh TPN/OPM pimpinan Goliat Tabuni. 15 Oktober Cepas kembali melaporkan terjadi kontak senjata antara TNI dengan kelompok TPN/OPM pimpinan Matias Mikawa di Arso .

Khusus mengenai kejadian 13 Oktober masyarakat kembali mencatat peristiwa berdarah di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Siapa pelaku penembakan, belumlah jelas. Tetapi saling tuding tetap menjadi tradisi buruk yang setiap kali ditampilkan, baik oleh masyarakat sipil maupun pihak aparat keamanan, tanpa mau menangani persoalan dengan akal sehat. Apalagi akses ke Puncak Jaya tetap menjadi satu kesulitan tersendiri. Sementara itu aparat keamanan–tim gabungan Polri–TNI terus melakukan pengejaran kepada kelompok masyarakat yang diduga pelaku pembunuhan 6 warga sipil melalui darat dan udara, hingga terjadi kontak senjata yang memakan 4 korban. Disela–sela keamanan masyarakat Papua yang terganggu, pada 29 Oktober pejabat Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Timbul Silaen

diganti oleh Brigjen Pol Drs. D. Sumantyan, HS, SH, yang pengangkatan dan pelantikannya dilakukan di Mabes Polri, Jakarta.

Pergantian ini mengulangi proses pengangkatan Kapolda Papua yang menyalahi ketentuan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi. Menurut UU No. 21 tahun 2001, Kepolisian Daerah Papua Provinsi Papua diatur dalam Bab XIII dengan dua pasal; pasal 48 yang terdiri dari 7 ayat dan pasal 49 yang terdiri dari 5 ayat. Dalam pasal 48 ayat 5; sangatlah jelas bahwa pengangkatan Kapolda Papua harus dengan persetujuan Gubernur Papua. Walaupun demikian sejak UU No.21 tahun 2001 diberlakukan sampai 2004, pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak mengindahkan peraturan ini. Kebijakan pergantian Kapolda Papua seakan-akan menjadi kewenangan Kapolri semata sedangkan Gubernur Papua yang mewakili masyarakat Papua tidak ada nilainya sedikitpun. Yang cukup mengherankan juga bahwa hal pergantian Kapolda telah dilakukan beberapa kali dengan prosedur yang sama. Padahal sebagai penegak hukum seharusnya POLRI mengetahui lebih baik daripada masyarakat biasa dan mentaatinya secara konsekwen.

BAB XIII: Kepolisian Daerah Propnsi Papua Pasal 48	
1.	Tugas Kepolisian di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia.
2.	Kebijakan mengenai keamanan di Provinsi Papua dikoordinasikan oleh kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubernur.
3.	Hal-hal mengenai tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat termasuk pembiayaan yang diakibatkannya, diatur lebih lanjut dengan perdas.
4.	pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipertanggungjawabkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua kepada Gubenur.
5.	Pengangkatan Kepala Kepolisian Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia dengan persetujuan Gubernur Provinsi Papua.
6.	Pemberhentian Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua dilakukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
7.	Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia atas pembinaan kepolisian di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negera Republik Indonesia

Sementara itu, laporan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke mengenai keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis gaharu di Assue Kabupaten Mappi ditanggapi serius oleh pihak kepolisian dengan mengirimkan tim investigasi ke lapangan sejak 17–30 November 2004. Pihak aparat keamanan mengakui keterlibatannya dalam bisnis gaharu, perdangan miras dan manusia (perempuan) di Assue Kabupaten Mappi.⁵ Apa yang terjadi di Assue juga terjadi di wilayah lain di Papua termasuk yang terjadi di Mariedi-Bintuni. Ketika masyarakat menuntut haknya mereka harus berhadapan dengan pihak penguasa dan aparat keamanan yang selalu dengan dalil menjaga keamanan aset pemerintah.

A.7. Tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil

Hampir menjadi tradisi di Wilayah Papua bahwa setiap tahun terjadi peristiwa yang membuat siapa saja yang punya hati manusia terpukul hebat. Masyarakat Papua di Kabupaten Puncak Jaya dan masyarakat Papua umumnya sekali lagi harus berduka karena 6 warga sipil terbunuh secara mengenaskan. Siapa pelakunya selalu menjadi misteri yang terus membingungkan dengan akibat masyarakat di sekitar Tinggi

⁵ Baca hasil investigasi Tim Polda Papua, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua; Masalah Bisnis Gaharu dan Dampaknya terhadap Hidup Suku Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue Kab. Mappi.

Nambut harus mengungsi. Suasana di Kabupaten Puncak Jaya menjadi tegang, masyarakat ketakutan sementara pemerintah tidak tahu harus berbuat apa.

Mengenai Kasus Mulia ada sejumlah cerita yang beredar dalam masyarakat. Namun sampai sekarang cerita mengenai apa yang sebenarnya terjadi masih simpang siur. Belum ada satu instansi pun yang berupaya mengungkapkan kejadian itu secara memadai. Tim 33 yang telah dibentuk oleh masyarakat dan DPRD Provinsi Papua untuk melakukan investigasi ternyata tidak dapat bekerja. Selain karena alasan keuangan dari instansi-instansi terkait, sebenarnya alasan mendasar yang cukup kelihatan dalam seluruh dinamika yang terjadi adalah kurang adanya kesungguhan pihak-pihak terkait. Misalnya sampai sekarang laporan Tim 7 DPRD Provinsi Papua tidak ada kelanjutannya. Sama halnya dengan pernyataan Dewan Adat Papua⁶ dan desakan Persekutuan Gereja-Gereja di Papua⁷ agar wakil rakyat (DPRD Papua) secara resmi meminta Komnas HAM menangani masalah Mulia hilang begitu saja. Sampai sekarang kasus Mulia seakan-akan tidak pernah terjadi; sementara laporan Tim 7 DPRD Papua menyatakan bahwa ada sejumlah masyarakat yang terpaksa mengungsi di hutan-hutan dan di daerah sekitar Kota Mulia dan ada juga yang akhirnya meninggal dunia karena kekurangan obat dan makanan yang telah mencapai lebih dari sepuluh orang.

Terhadap Kasus Mulia cukup banyak simpati datang dari masyarakat. Banyak bantuan terkumpul di daerah Papua juga di luar Papua. Tetapi sekali lagi masih ada kendala, bahwa sudah ada sumbangan tetapi tidak ada dana untuk menyewa transportasi guna mengangkut bantuan yang ada. Apalagi pihak aparat keamanan kurang bersedia menjalankan tugas di luar Kota Mulia. Jaminan keamanan di Kabupaten Puncak Jaya tidak bisa diharapkan kepada aparat yang memang punya tanggung jawab untuk itu. Sangat mengherankan bahwa dalam situasi seperti itu Pemerintah Provinsi Papua berlagak seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika Tim 33 siap bekerja malah tidak ada anggaran.

B. Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya

B.1. Hak atas taraf kehidupan yang layak⁸

Kesulitan BBM masih terasa sepanjang bulan Oktober. Media massa lokal mencatat bahwa masyarakat menyampaikan keluhannya kepada pihak terkait, seperti juga demonstran ibu-ibu ke kantor DPRD Timika. Kesulitan BBM bukan hal yang baru terjadi pada tahun 2004, tetapi hampir terjadi setiap tahun. Namun instansi terkait biasanya baru menanggapi kalau ada reaksi dari masyarakat. Media massa di Papua mencatat akibat kekurangan BBM, depot-depot penuh dengan antrean kendaraan seperti di Jayapura, Sentani, Nabire, Timika, Manokwari dan Wamena. Juga pedagang eceran BBM-bensin bermunculan dimana-mana. Harga bensinnya pun bervariasi.

Pelayanan PLN Ranting Cabang Wamena juga menjadi catatan tersendiri bagi media lokal Papua. Masyarakat mengeluh buruknya pelayanan PLN. Masyarakat mengeluh bukan saja karena listrik di Wamena sering padam hingga banyak alat elektronik rusak tetapi karena keluhan yang sama telah berulang kali disampaikan namun tidak ada tanggapan dari pihak PLN. Buruknya pelayanan PDAM juga

⁶ Pernyataan Dewan Adat Papua, tanggal 23 November 2004.

⁷ Surat Persekutuan Gereja-Gereja di Papua kepada Ketua DPRD Provinsi Papua, tanggal 3 November 2004.

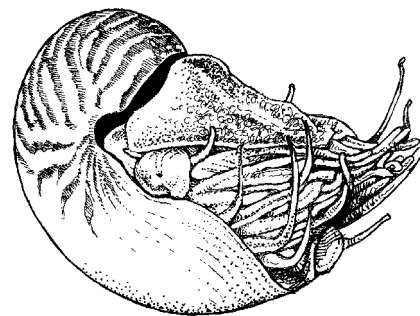
⁸ Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Bagian III, pasal 11 ayat 1.

menjadi keluhan warga BTN Tanah Hitam di Abepura Jayapura. Warga BTN Tanah Hitam mendatangi kantor Cabang PDAM di Abepura dan minta pertanggungjawaban pelayanan pihak Perusahaan Daerah Air Minum karena warga sudah 5 bulan tidak mendapat layanan air bersih.

Sementara itu segala perekonomian di Kabupaten Nabire lumpuh akibat gempa bumi. Berbagai sarana pelayanan masyarakat dan kegiatan perekonomian masyarakat tidak dapat berjalan secara normal. Banyak simpati datang dari berbagai penjuru tanah air juga dari luar negeri seperti yang disampaikan secara langsung oleh pemerintah Jepang melalui Deputy Resident Representative JIC, Mituo Hirano.

B.2. Hak atas pekerjaan⁹

Pada tahun ini pemerintah secara nasional menyelenggarakan penerimaan pegawai negeri secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Papua masyarakat sangat antusias mendatangi tempat-tempat pendaftaran. Para pendaftar membludak hingga kekurangan formulir pendaftar dan mengusulkan ke Provinsi untuk menambah formulir seperti Kabupaten Mimika dan Biak-Numfor. Secara menyeluruh tenaga kerja yang dibutuhkan formasi tahun 2004 adalah 4.295 PNS. Namun dalam pembagiannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tidak semua Kabupaten di Papua menyelenggarakan penerimaan PNS antara lain Kabupaten Waropen dan Supiori. Khusus untuk tahun ini tenaga yang dibutuhkan hampir di seluruh Papua terfokus pada bidang prioritas Papua yaitu tenaga kesehatan dan tenaga pengajar.



Pendaftar PNS tahun 2004 mencapai jumlah 12 kali lipat lebih banyak dari formasi yang tersedia. Jumlah formasi PNS yang dibutuhkan tahun ini hanya sebesar 4.295 sedangkan pendaftar CPNS berjumlah 50 ribuan orang, menurut catatan media massa lokal. Apakah ini berarti penganggur di Papua sangat banyak atau lapangan kerja yang sangat terbatas? Jika memang demikian, pemerintah harus segera menentukan kebijakan menciptakan peluang kerja bagi warganya. Tetapi sepertinya ada gejala lain, dalam masyarakat Papua. Ada semacam pola pikir baru yang makin tertanam dalam masyarakat. Masyarakat menganggap bidang kerja lain seperti bertani atau wiraswasta bukan suatu pekerjaan berarti. Dan sebaliknya bekerja sebagai pegawai negeri sudah pasti akan mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Kenyataan ini akan menghambat pembangunan di Papua. Untuk membangun Papua ke depan masyarakat harus dapat berperan di berbagai bidang dan tidak harus semua bekerja pada bidang pemerintahan.

Berkaitan dengan pendaftar CPNS yang membludak sudah pasti bahwa akan terjadi banyak persaingan untuk lolos sebagai PNS. Dan banyak pengalaman di seantero Indonesia bahwa kesempatan penerimaan CPNS merupakan salah satu lahan subur bagi praktek KKN. Dengan uang apa saja dapat dibeli. Dan pada umumnya masyarakat menerima praktek kotor KKN sebagai suatu yang wajar saja dan tidak bisa dihindari. Hal ini sangat menguntungkan bagi orang-orang berduit sementara bagi masyarakat tidak berduit, kesempatan untuk melakukan KKN dan menjadi pegawai negeri sangatlah terbatas bahkan tertutup sama sekali. Situasi ini menjadi salah satu kendala sekaligus pergumulan tersendiri bagi masyarakat asli Papua sebagaimana diutarakan oleh Ketua KNPI Tolikara Alfius Lambe, dan Ketua KNPI

⁹ *Ibid*, pasal 6 ayat 1.

Jayapura, Frits Yom agar dalam penerimaan PNS tahun ini pemerintah harus memberikan prioritas kepada masyarakat asli Papua. Ini salah satu aspek Papuanisasi yang diamanatkan dalam Otsus Papua yang tidak diperhatikan Pemerintah Pusat dengan sistem penerimaan CPN tahun 2004. Sistem ini membuka peluang besar dari luar Papua, apalagi dari sisi pendidikan kualitas lulusan di Papua jelas kalah bersaing dengan lulusan dari luar Papua. Maka tidak heran jika masyarakat Papua akan terus terpojokan.

Khusus untuk praktek KKN Pemerintah SBY berkomitmen untuk memberantas hingga tuntas. Dalam kaitannya dengan itu pemerintah Papua berjanji akan menyelenggarakan PNS tahun 2004 secara tertib dan bersih dari praktek KKN. Kepada pihak panitia yang kedapatan melakukan penyelewengan akan ditindak tegas, bahkan dipecat. Ini komitmen bagus yang cukup menentukan perubahan di Papua tetapi sangat tergantung dari kemauan baik semua pihak.

PENERIMAAN PNS FORMASI 2004		
Jatah Provinsi Papua	:	4.295 PNS
Rincian		
Tenaga Medis	:	1.125 PNS
Tenaga Guru	:	1.727 PNS
Tenaga Teknis	:	1.140 PNS
Peserta ujian	:	50 – an ribu calon

B. 3. Hak atas Kesehatan

Kondisi kesehatan di Papua dalam triwulan Oktober-Desember tidak banyak mendapat perhatian publik. Padahal diketahui bahwa kesehatan adalah salah satu prioritas Provinsi Papua yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermartabat dimana masyarakat Papua boleh mendapat pelayanan kesehatan bukan saja di daerah perkotaan tetapi juga di daerah terpencil yang sering ditinggalkan petugas. Dengan prioritas penerimaan CPNS tahun 2004 belum tentu dapat menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Karena persoalannya bukan saja soal jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai atau keterbatasan fasilitas tetapi terutama keseriusan pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat.



Dalam kaitannya dengan itu Pemerintah Papua melalui Dinas Kesehatan harus membuat perjanjian kerja dengan PNS yang baru dengan tugas yang jelas. Pemerintah juga harus tegas mengambil sikap apabila petugas tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah disepakati bersama. Ini penting untuk mendorong PNS baru untuk tidak berpikir bahwa kerja itu soal hak setiap orang tetapi juga suatu kewajiban untuk melayani kepentingan masyarakat.

Aspek kesehatan yang menjadi sorotan dalam media selama triwulan ini adalah kampanye-kampanye tentang HIV/AIDS, terutama penyadaran dalam dunia

pendidikan. Aksi kampanye seperti ini dilaksanakan hampir setiap tahun dengan kelompok sasaran yang berbeda. Namun laju penyebaran dan angka penderita HIV/AIDS terus bertambah. Kabupaten Puncak Jaya yang sampai dengan bulan September 2004 belum ditemukan kasus HIV/AIDS, kini telah tercatat satu kasus HIV/AIDS. Sementara Distri Assue Kabupaten Mappi kini telah tercatat 35 orang tertular HIV/AIDS.¹⁰ Sampai dengan akhir tahun 2004 penderita HIV/AIDS di Papua telah mencapai 1706 orang¹¹. Penderita terbanyak berasal dari kelompok muda berusia 20-29 tahun yang merupakan harapan masa depan Papua.

Situasi penyebaran HIV/AIDS di Papua cukup serius. Hal ini cukup menjadi alasan Gubernur Papua menginstruksikan kepada instansi terkait dan masyarakat Papua untuk berperang melawan HIV/AIDS. Bahkan secara khusus Wagub Constant Karma mengajak umat beragama di seluruh Papua untuk melakukan tobat massal. Tepatlah masyarakat Papua dan secara khusus tokoh agama di Papua turut menyumbang guna menekan penyebaran HIV/AIDS. Tetapi pendekatan moral saja belum cukup. Sudah saatnya pemerintah berpikir untuk menggunakan pendekatan politis dan hukum. Perlu semacam Perda untuk mengatur masuk-keluar para Pekerja Seks Komersial (PKS), juga wilayah operasinya dan para aparat negara yang terlibat memasukkan PSK di daerah-daerah terpencil seperti di Kabupaten Mappi dan Agats, sebab selama ini unsur ini belum ditangani secara serius melalui proses hukum yang benar.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Merauke terus melakukan upaya-upaya menangani HIV/AIDS. Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke telah membangun gedung Pokja HIV/AIDS untuk mengontrol dan berupaya menekan laju penyebarannya. Bangunan gedung Pokja sendiri direncanakan akan selesai awal tahun 2005 dan sudah dapat digunakan untuk melayani masyarakat.

C. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Harian Cenderawasih Pos terus mencatat kejadian-kejadian kekerasan terhadap perempuan, baik itu berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Pelakunya bervariasi selain keluarga sendiri, teman, tetangga, juga aparat keamanan dan guru yang sebenarnya panutan bagi masyarakat. Yang terjadi dalam tiga bulan terakhir kebanyakan menimpa anak-anak di bawah umur, sebagaimana yang terjadi di Hamadi dan di Manimeri III Kampung Bumi Sanirari-Bintuni.



Kejadian sadis yang patut dicatat adalah penyiksaan¹² hingga meninggalnya Magdalena Marani di Polresta Jayapura. Pelaku

¹⁰ *Bisnis Gaharu dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Papua Selatan*, Merauke: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, hlm.29 (www.hampapua.org/skp/skp06/var-05i.pdf).

¹¹ Jumlah kasus HIV/AIDS Per 30 September 2004, Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua.

¹² Yudhawanata, A & Budiman, I., 2003. *Penyiksaan dan Mereka yang selamat*, Jakarta: ICMC dan LSPP. Penyiksaan tidak pernah dilakukan tanpa tujuan. Penyiksaan juga selalu direncanakan terlebih dahulu. Pada umumnya penyiksaan dilakukan untuk melayani penguasa dengan tujuan: mendapatkan informasi, memaksa agar mengakui sesuatu, untuk mendapatkan kesaksian yang melibatkan pihak lain, untuk membalas dendam, untuk menebarkan teror dalam masyarakat tertentu, untuk menghancurkan kepribadian seseorang dan untuk melenyapkan semangat oposisi pada kekuatan politik tertentu.

yang sebenarnya menjadi pelindung dan penegak hukum justru menunjukkan citra dan peran yang buruk terhadap masyarakat. Kejadian ini tentu menjadi pukulan hebat bagi masyarakat di Papua dan lebih khusus bagi perempuan-perempuan di Indonesia, karena kejadian tersebut bertepatan dengan Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan 25 November. Maka pantaslah jika Kapolda Papua, Brigjen Pol Drs. D. Sumantyan HS, SH kemudian meminta maaf atas kekhilafan aparatnya.

Sementara itu perdagangan perempuan di Assue Kabupaten Mappi¹³ menjadi sorotan Forum Peduli Assue. Mungkin ini salah satu kasus perdagangan perempuan di daerah terpencil yang baru terekspos, sementara banyak kasus belum terkuak sampai sekarang. Perdagangan perempuan di tingkat perkotaan tetap saja dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat walaupun sering dipersoalkan sampai ke tingkat penentu kebijakan.

Kejahatan terhadap perempuan dan anak terus saja terjadi dimana-mana. Dalam dialog interaktif di Auditorium TVRI Jayapura LP3A-P menyinggung mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Papua selama tahun 2003. Dari kasus yang sempat ditangani LP3A-P selama tahun 2003 tercatat 61 kasus; 12 kasus kekerasan fisik dan 49 kasus kekerasan seksual yang terdiri dari 15 kasus pencabulan, 7 kasus percobaan pemerkosaan dan 27 kasus pemerkosaan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada umumnya dilakukan ketika pelaku dalam kondisi mabuk.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam triwulan ini hanya ada satu kasus yang dicatat. Itu bukan berarti karena tindak kekerasan dalam rumah tangga di Papua mengalami penurunan kasus tetapi lebih karena masyarakat pada umumnya menganggap tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga belaka. Bahkan ada kesan masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang wajar. Sebagai akibat ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dicari bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikan persoalan. Padahal tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hukum¹⁴. Untuk itu masyarakat perlu dibantu untuk memahami hak dan kedudukan perempuan dalam perubahan dunia sekarang termasuk kenyataan hukum yang berlaku seperti keluarnya UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penegak hukum dan LSM yang menangani persoalan perempuan bisa mengambil peran ini.



¹³ *Bisnis Gaharu dan Dampaknya Terhadap Kehidupan orang Awyu dan Wiyagar di Distrik Assue Kabupaten Mappi, Papua Selatan*, Merauke: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (www.hampapua.org/skp/skp06/var-05i.pdf).

¹⁴ Bdk. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I, pasal 1, ayat 1.